

Katalog: 9302023.3573

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA MALANG MENURUT PENGELUARAN 2018 - 2022



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MALANG

**PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
KOTA MALANG
MENURUT PENGELUARAN
2018 - 2022**

<https://malangkota.bps.go.id>



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA MALANG
MENURUT PENGELUARAN 2018 - 2022**

Nomor Publikasi : 35730.2308
Katalog BPS : 9302023.3573

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 70 Halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Kota Malang

Gambar Kulit:
Badan Pusat Statistik Kota Malang

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik Kota Malang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**TIM PENYUSUN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA MALANG
MENURUT PENGELUARAN 2018 - 2022**

Penanggungjawab:

Erny Fatma Setyoharini, S.E., M.M.

Penyunting:

Ir Lies Alfiah

Rizky Maulidya, SST

Penulis:

Soekesi Irawati, S.Psi., M.M

Gambar Sampul:

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas PDRB menurut pengeluaran/permintaan akhir, yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), dan Net Ekspor Barang dan Jasa. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Malang, April 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Malang



Erny Fatma Setyoharini, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2
1.2. KEGUNAAN PDRB STATISTIK PDRB	4
1.3. PERUBAHAN TAHUN DASAR PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	11
2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA.....	12
2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT	16
2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	19
2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB).....	22
2.5. PERUBAHAN INVENTORI.....	28
2.6. EKSPOR IMPOR.....	32
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA MALANG MENURUT PDRB PENGELUARAN 2018 – 2022.....	35
3.1. TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA MALANG MENURUT PENGELUARAN.....	37
3.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	44
3.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT	46
3.4. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	47
3.5. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	49
3.5. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI.....	50
3.6. PERKEMBANGAN NET EKSPOR BARANG DAN JASA.....	52
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KOTA MALANG 2018 – 2022	55
4.1. PDRB (NOMINAL)	56
4.2. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB	57
4.3. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB.....	58
BAB V PENUTUP	60
LAMPIRAN	63
DAFTAR PUSTAKA	70

<https://malangkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,	37
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran,	39
Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,	41
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2018 - 2022	42
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Malang,	43
Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga,	44
Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT	46
Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	47
Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB	50
Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori	51
Tabel 11. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa	53
Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkpita	56
Tabel 13. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	57
Tabel 14. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB.....	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,.....	37
Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,.....	39
Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2018 - 2022.....	40
Grafik 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,	41
Grafik 5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2018 - 2022	42

<https://malangkota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Malang	64
Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang	65
Tabel 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran	66
Tabel 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang	67
Tabel 5 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kota Malang	68
Tabel 6 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kota Malang	69



BAB I *PENDAHULUAN*

<https://malangkota.bps.go.id>

1.1. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan

Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2. KEGUNAAN PDRB STATISTIK PDRB

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerataan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja dan juga diharapkan dapat mencapai target-target seperti yang telah ditetapkan baik untuk regional atau nasional. Untuk mengukur kinerja perkembangan ekonomi di suatu wilayah dapat diamati melalui pertumbuhan ekonomi makro, struktur perekonomian, pendapatan perkapita dan indikator ekonomi lainnya. Data statistik dan indikator ekonomi dapat digunakan untuk menganalisis dan menentukan arah kebijaksanaan serta mengevaluasi hasil pembangunan. Salah satu indikator ekonomi yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai perekonomian regional secara makro adalah data PDRB menurut pengeluaran.

Kota Malang mempunyai potensi yang besar serta cita-cita yang tinggi seperti tertuang dalam visi dan misinya. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran atas kinerja dari strategi-strategi yang dilakukan sesuai dengan garis-garis haluan yang telah ditetapkan. Publikasi PDRB Pengeluaran Kota Malang merupakan potret dari kinerja pembangunan ekonomi makro Kota Malang dilihat dari sisi besaran konsumsi, investasi dan ekspor-impor, kontribusinya terhadap perekonomian regional dan laju pertumbuhannya yang dilakukan. Diharapkan informasi ini bisa menjadi bahan evaluasi dan menjadi pijakan kuat untuk alat perencanaan bagi pemerintah daerah, selebihnya diharapkan bisa menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi masyarakat pengguna data lainnya.

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

1.3. PERUBAHAN TAHUN DASAR PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan

yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional. Satu bentuk implementasi dari System of National Accounts (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA2008.

SNA2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB. SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi.

Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk Supply and Use Tables (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;

- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- a. Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- b. Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- c. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
- d. Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA2008;
- e. Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- f. Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- **Konsep dan Cakupan**

- a. Sumber daya hayati (cultivated biological resources/CBR). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang

diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.

- b. Sistem persenjataan (military weapon systems/MWS). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (research and development/RnD). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (mineral exploration and evaluation/MEE). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industry pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (Central Bank/CB). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (computer software and databases/CSD).CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan databases, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industry yang melakukannya dan PMTB.

- g. Produk kekayaan intelektual (entertainment, literary or artistic originals/ELA). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- **Metodologi**

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (Financial intermediation services indirectly measured / FISIM). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (deposits), bunga pinjaman (loans), dan suku bunga referensi (reference). Metoda ini menggantikan metoda Imputed Bank Services Charge (IBSC).

- **Valuasi**

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (Basic Price). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produksi.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan klasifikasi PDRB Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

<https://malangkota.bps.go.id>



BAB II ***METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA***

<https://malangkota.bps.go.id>

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Komponen konsumsi rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan

7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, minuman, dan rokok
2. Pakaian dan alas kaki
3. Perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga
4. Kesehatan dan pendidikan
5. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya
6. Hotel dan restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*); Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;

- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010. Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a) Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b) Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;

6. PKRT ADHK 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i. Pendahuluan

Komponen konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai komponen tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Komponen ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;

- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-Profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut.

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

- i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$
- j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

- X : PK-LNPRT ADHB
- N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Komponen konsumsi pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah :

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan
- f. serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi ADHB

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{PK-P ADHB} = \text{Output non pasar-penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi ADHB, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi ADHK

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.\

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti bangunan dan konstruksi

lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;

2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (*overall* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

- a) Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b) Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) setempat.
- c) Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga (level provinsi).
- d) Laporan keuangan perusahaan.
- e) Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f) IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g) Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h) Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- i) Publikasi Statistik Konstruksi.
- j) Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k) Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor

ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADHB atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHK, maka PMTB ADHB tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan,

dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADHB maupun ADHK.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK adalah dengan men-*deflate* PMTB (ADHB) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB ADHK dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB, nilai PMTB ADHK tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB ADHK adalah dengan cara men-*deflate* PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADHK-nya diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk ADHK diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a) Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b) Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c) Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh

eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a) Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b) Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material dan supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c) Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d) Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e) Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f) Ternak untuk tujuan dipotong;
- g) Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan

- h) Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADHB, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- Menghitung posisi inventori ADHK, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori ADHK dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- Menghitung perubahan inventori ADHB dengan *menginflate* perubahan inventori ADHK dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHK dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;

- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR IMPOR

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan jaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor disuatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/ dari provinsi tersebut
- c. Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- d. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA MALANG
MENURUT PDRB PENGELUARAN 2018 – 2022

<https://malangkota.bps.go.id>

Proses pembangunan ekonomi yang terjadi di Kota Malang pada periode 2018 sampai dengan 2022 mengakibatkan perubahan struktur ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Malang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1. TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA MALANG MENURUT PENGELUARAN

Selama tahun 2018-2022 perekonomian Kota Malang menunjukkan tanda peningkatan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonominya yang menunjukkan arah positif dan terus meningkat, meskipun sempat terjadi kontraksi pada tahun 2020 akibat adanya perubahan ekonomi global dari dampak pandemi. Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Malang meningkat menjadi 6,32 persen, dari tahun sebelumnya sebesar 4,21 persen.

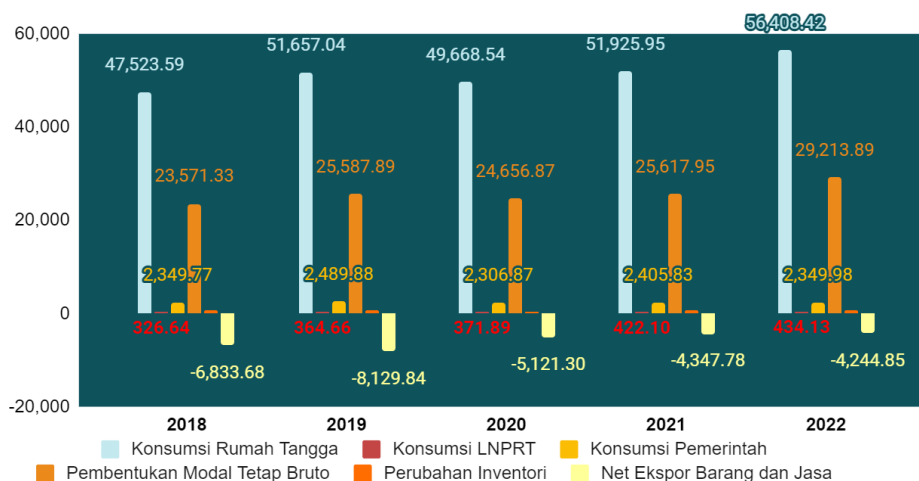
**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kota Malang 2018 - 2022**

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	47.523.595,13	51.657.042,11	49.668.544,71	51.925.952,81	56.408.423,93
2. Konsumsi LNPRT	326.644,23	364.660,93	371.897,54	422.101,87	434.130,93
3. Konsumsi Pemerintah	2.349.777,70	2.489.887,90	2.306.875,82	2.405.835,41	2.349.983,98
4. PMTB	23.571.333,18	25.587.890,37	24.656.879,78	25.617.951,26	29.213.899,42
5. Perubahan Inventori	758.687,56	794.567,69	280.294,39	593.289,10	645.843,84
6. Net Ekspor	-6.833.689,96	-8.129.843,56	-5.121.303,72	-4.347.785,53	-4.244.850,03
Total PDRB	67.696.347,84	72.764.205,45	72.163.188,51	76.617.344,92	84.807.432,08

*Angka Sementara/Preliminary Figures
**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

**Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kota Malang 2018 - 2022**



Dalam penghitungannya PDRB menurut Pengeluaran disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2010. PDRB Pengeluaran berdasarkan harga berlaku menjelaskan tentang besaran nominal PDRB menurut Pengeluaran karena dipengaruhi oleh perubahan volume dan perubahan harga yang berlaku di tahun tersebut. Sedangkan, PDRB Pengeluaran atas dasar harga konstan menjelaskan besaran PDRB yang hanya dipengaruhi oleh perubahan volume saja (harga diasumsikan tetap). Nilai PDRB Kota Malang atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan trend positif dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 PDRB Kota Malang mengalami penurunan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan struktur ekonomi secara global maupun regional.

PDRB menurut pengeluaran selain dinilai ADHB juga dinilai ADHK 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2018-2022, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Malang berdasarkan PDRB atas dasar harga Konstan dapat dilihat pada Tabel 2. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan trend positif dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 PDRB Kota Malang mengalami penurunan.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran,
Kota Malang Tahun 2018 - 2022**

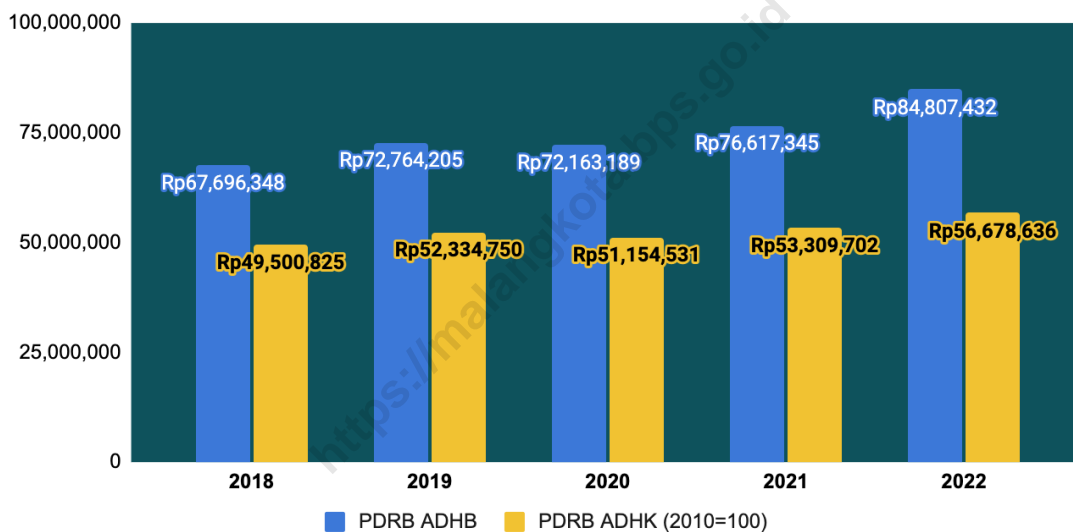
Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	34.066.650,51	35.807.395,54	34.383.879,24	35.284.130,85	37.324.951,50
2. Konsumsi LNPRT	198.406,59	217.296,88	218.044,58	246.448,21	249.281,48
3. Konsumsi Pemerintah	1.409.381,49	1.453.293,26	1.403.578,78	1.407.894,35	1.431.515,30
4. PMTB	16.256.962,68	17.322.035,97	16.496.334,06	16.544.177,99	18.422.598,05
5. Perubahan Inventori	410.126,43	416.098,18	144.800,33	297.747,03	303.337,81
6. Net Ekspor	-2.840.702,46	-2.881.369,55	-1.492.106,47	-470.696,07	-1.053.047,65
Total PDRB	49.500.825,23	52.334.750,27	51.154.530,52	53.309.702,35	56.678.636,48
<i>*Angka Sementara/Preliminary Figures</i>					
<i>**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures</i>					

**Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kota Malang Tahun 2018 - 2022**



PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2018-2022, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Malang berdasarkan PDRB atas dasar harga Konstan dapat dilihat pada tabel dan grafik di atas. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan trend positif dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 PDRB Kota Malang mengalami penurunan.

Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2018 - 2022



Nilai PDRB ADHB yang pada umumnya lebih besar dari nilai PDRB ADHK dapat dilihat pada grafik di atas. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga atau naik turunnya harga komoditas dalam penghitungan PDRB ADHB. Dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah diabaikan. Atau dengan kata lain penghitungan PDRB ADHK tidak dipengaruhi oleh harga suatu komoditas.

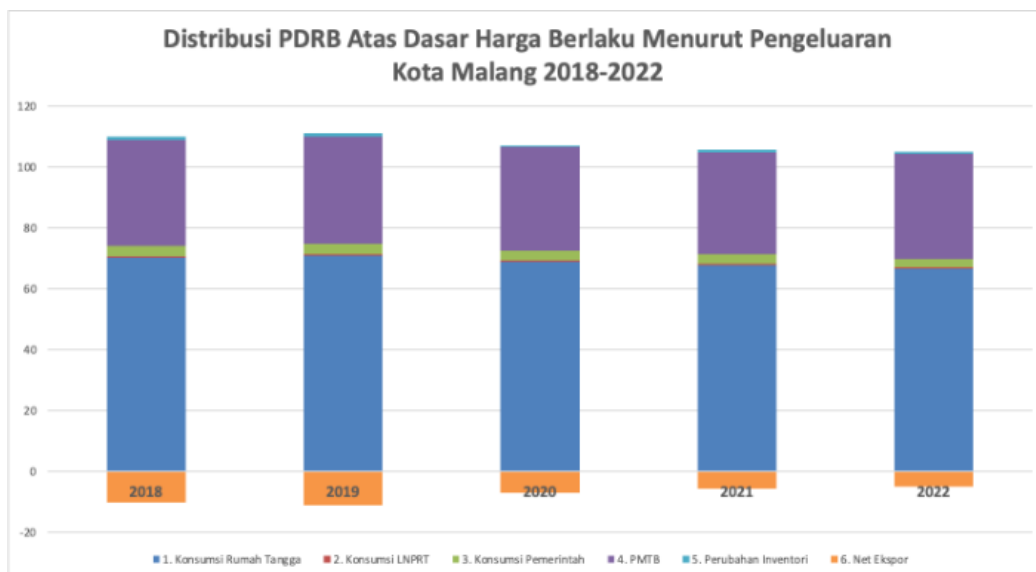
Total PDRB atau terbentuknya keseluruhan PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi

akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan net ekspor barang dan jasa.

**Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kota Malang Tahun 2018 - 2022**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	70,20	70,99	68,83	67,77	66,51
2. Konsumsi LNPRT	0,48	0,50	0,52	0,55	0,51
3. Konsumsi Pemerintah	3,47	3,42	3,20	3,14	2,77
4. PMTB	34,82	35,17	34,17	33,44	34,45
5. Perubahan Inventori	1,12	1,09	0,39	0,77	0,76
6. Net Ekspor	-10,09	-11,17	-7,10	-5,67	-5,01
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>*Angka Sementara/Preliminary Figures</i>					
<i>**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures</i>					

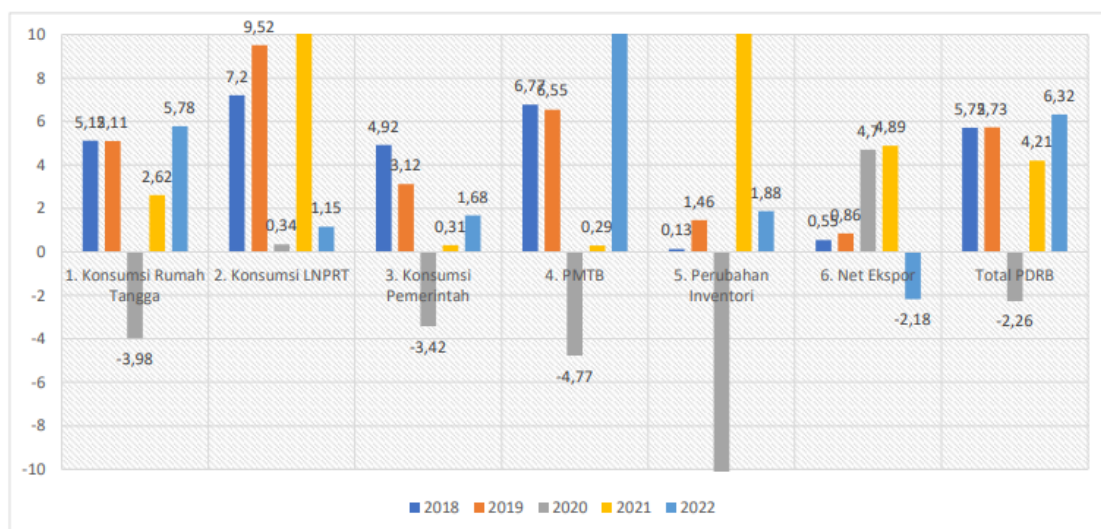
**Grafik 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kota Malang Tahun 2017 - 2021**



Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2018 - 2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,12	5,11	-3,98	2,62	5,78
2. Konsumsi LNPRT	7,20	9,52	0,34	13,03	1,15
3. Konsumsi Pemerintah	4,92	3,12	-3,42	0,31	1,68
4. PMTB	6,77	6,55	-4,77	0,29	11,35
5. Perubahan Inventori	0,13	1,46	-65,20	105,63	1,88
6. Net Ekspor	0,55	0,86	4,70	4,89	-2,18
Total PDRB	5,72	5,73	-2,26	4,21	6,32
<i>*Angka Sementara/Preliminary Figures</i>					
<i>**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures</i>					

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang Tahun 2018 - 2022



Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang dari tahun 2018 sampai dengan 2022 secara rata-rata mencapai 3,94 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,72 persen (2018); 5,73 persen (2019); -2,26 persen (2020); 4,21 persen (2021) sementara 6,32 persen (2022). Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 6,32 persen, sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhannya berkontraksi hingga mencapai -2,26 persen.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Malang, Tahun 2018 - 2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	139,50	144,26	144,45	147,17	151,13
2. Konsumsi LNPRT	164,63	167,82	170,56	171,27	174,15
3. Konsumsi Pemerintah	166,72	171,33	164,36	170,88	164,16
4. PMTB	144,99	147,72	149,47	154,85	158,58
5. Perubahan Inventori	184,99	190,96	193,57	199,26	212,91
6. Net Ekspor	-9,08	-12,86	-11,04	-14,31	-9,50
Total PDRB	136,76	139,04	141,07	143,72	149,63
<i>*Angka Sementara/Preliminary Figures</i>					
<i>**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures</i>					

Indeks implisit¹ PDRB menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri).

¹ *Indeks perkembangan*

3.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Secara parsial, konsumsi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Terdapatnya pengaruh yang signifikan dan positif antara konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Malang ditentukan oleh konsumsi. Apabila konsumsi mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan konsumsi berarti telah terjadi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Terjadinya peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa akan memaksa perekonomian untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa akan menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Konsumsi akhir rumah tangga secara struktur menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Kota Malang, Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
1	2	3	4	5	6
Total Konsumsi Rumahtangga					
a. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rp)	47.523.595,13	51.657.042,11	49.668.544,71	51.925.952,81	56.408.423,93
b. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Juta Rp)	34.066.650,51	35.807.395,54	34.383.879,24	35.284.130,85	37.324.951,50
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	70,20	70,99	68,83	67,77	66,51
Rata-rata konsumsi per-Kapita (Ribu Rp)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Ribu Rp)	54.869,65	59.329,40	58.862,24	61.455,70	66.666,69
b. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Ribu Rp)	39.332,57	41.125,69	40.748,37	41.759,68	44.112,76
Pertumbuhan²					

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga kosntan/ADHK 2010)

a.	Total Konsumsi Rumah Tangga	5,12	5,11	-3,98	2,62	5,78
b.	Perkapita	4,55	4,56	-0,92	2,48	5,63
Jumlah penduduk (Jiwa)		866.118	870.682	843.810	844.933	846.126
<i>*Angka Sementara/Preliminary Figures</i>						
<i>**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures</i>						

Tabel 6 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2018–2022 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan kecuali pada tahun 2020 yang penurunannya mencapai -3,98 persen. Kenaikan konsumsi ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Pertumbuhan penduduk yang meningkat tiap tahunnya mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga yang juga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, kondisi global juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti yang terjadi pada tahun 2020 dimana terjadinya pandemi Covid-19 memberikan efek pada turunnya konsumsi rumah tangga.

Rata-rata konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun hingga tahun 2022 terus berfluktuatif, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2018, setiap rumah tangga di Kota Malang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 54.869,65 ribu rupiah untuk membiayai konsumsi baik berupa makanan maupun bukan makanan. Pengeluaran konsumsi ini meningkat pada tahun setelahnya menjadi 59.239,40 ribu rupiah (2019). Kemudian pada tahun berikutnya menurun menjadi 58.862,24 ribu rupiah (2020), hal ini disebabkan oleh adanya pandemi yang mengakibatkan seluruh kegiatan perekonomian terganggu. Kemudian meningkat lagi menjadi 61.455,70 ribu rupiah (2021) dan 66.666,69 ribu rupiah (2022).

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK pada tahun 2018 sebesar 5,12 persen dan pada tahun 2019 menurun menjadi 5,11 persen. Kemudian turun anjlok hingga mencapai -3,83 persen (2020). Pada tahun 2021 konsumsi rumah tangga berhasil meningkat kembali sebesar 2,62 persen dan

tahun 2022 meningkat secara signifikan menjadi 5,78 persen. Pertumbuhan konsumsi per-kapita selaras dengan pertumbuhan konsumsi total ADHK dari 4,55 persen pada tahun 2018 sebesar 4,56 tahun 2019. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan konsumsi per-kapita sebesar -0,92 persen. Pada tahun 2021 pertumbuhan konsumsi per-kapita dapat bangkit kembali sebesar 2,48 persen dan pada tahun 5,63 persen. Peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadinya perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB.

3.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya ke depan dapat lebih ditingkatkan lagi dan secara tidak langsung juga mampu meningkatkan nilai PDRB wilayah tersebut. Data berikut menunjukkan proporsi lembaga non profit (LNPRT) terhadap PDRB.

**Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT
Kota Malang, Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
1	2	3	4	5	6
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB	326.644,23	364.660,93	371.897,54	422.101,87	434.130,93
b. ADHK 2010	198.406,59	217.296,88	218.044,58	246.448,21	249.281,48
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,48	0,50	0,52	0,55	0,51
*Angka Sementara/Preliminary Figures					
**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures					

Selama periode tahun 2018 – 2022 konsumsi LNPRT baik secara ADHB maupun ADHK 2010 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018 konsumsi LNPRT ADHB sebesar 326.644 juta rupiah kemudian meningkat menjadi 364.660 juta rupiah (2019), 371.897 juta rupiah (2020), 422.101 juta rupiah (2021), dan 434.130 juta rupiah (2022). Demikian juga dengan konsumsi LNPRT secara ADHK yaitu sebesar 198.406 juta rupiah pada tahun 2017 dan selanjutnya terus meningkat hingga sebesar 249.281 juta rupiah pada tahun 2022. Jika dilihat peranannya, proporsi konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) relatif stabil selama periode 2018 – 2022 dan merupakan komponen yang paling kecil kontribusinya dalam pengeluaran produk domestik regional bruto yaitu kurang dari 1 persen.

3.4. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir dalam perekonomian suatu wilayah terdiri dari konsumsi akhir pemerintah ditambah pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT. Secara umum pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan baik untuk ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2018 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 2.349.777 juta rupiah, kemudian berfluktuatif tiap tahunnya hingga pada tahun 2022 nilainya menurun dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 2.349.983 juta rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010, yang juga berfluktuatif mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

**Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Kota Malang, Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
1	2	3	4	5	6
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Juta Rp)	2.349.777,70	2.489.887,90	2.306.875,82	2.405.835,41	2.349.983,98
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	1.409.381,49	1.453.293,26	1.403.578,78	1.407.894,35	1.431.515,30

Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	3,47	3,42	3,20	3,14	2,77
Pertumbuhan³					
a. Total Konsumsi Pemerintah	4,92	3,12	-3,42	0,31	1,68
<i>*Angka Sementara/Preliminary Figures</i>					
<i>**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures</i>					

Apabila dicermati lebih lanjut proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB cenderung turun dari 3,47 persen di tahun 2018 menjadi 2,77 persen pada tahun 2022. Sepanjang periode 2018-2022, proporsi terendah terjadi pada periode tahun 2022 yaitu sebesar 2,08 persen, sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2018 yang mencapai 3,47 persen.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total cenderung menunjukkan penurunan, hal ini diikuti oleh adanya penurunan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2018 konsumsi pemerintah per-kapita ADHB sebesar 2.713 ribu rupiah, dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita ADHK 2010 juga menunjukkan cenderung adanya peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Jika dilihat dari laju pertumbuhannya sebesar 4,35 (2018). Namun pada periode tahun 2019 sd. 2022 kembali menurun menjadi 2,58 persen (2019) dan -1,53 persen (2022).

Selama periode tahun 2018-2022 pengeluaran konsumsi akhir pemerintah cenderung menunjukkan peningkatan (baik ADHB maupun ADHK 2010) kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan dikarenakan pada tahun tersebut ada kebijakan pemerintah pusat yaitu realokasi anggaran untuk

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

penanganan pandemi Covid-19. Di sisi lain jumlah pegawai pemerintah dari tahun ke tahun terus berfluktuatif dalam rentang 6 hingga 7 ribu. Pada tahun 2018 jumlah pegawai pemerintah berjumlah 7.130 orang, tahun selanjutnya menurun menjadi 6.973 orang (2019), 6.287 orang (2020). Kemudian, jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 6.399 orang (2021) dan 7.130 orang (2022). Penurunan pegawai terkait adanya moratorium dari pemerintah untuk tidak merekrut pegawai baru, selain itu juga banyak pegawai pemerintah yang sudah purna tugas.

Gambaran konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun per penduduk. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Selama kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan 2022 pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018, total konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 4,92 persen, untuk konsumsi per-kapita 4,35 persen, sedangkan untuk konsumsi per-pegawai sebesar 7,88 persen.

3.5. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Di dalam PDRB menurut pengeluaran komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB), lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁴. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan kecenderungan

⁴ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

peningkatan baik secara nominal maupun riil, meskipun demikian andil PMTB terhadap PDRB Kota Malang cenderung tetap pada lima tahun terakhir.

**Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kota Malang, Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
1	2	3	4	5	6
Total PMTB					
a. ADHB (Juta Rp)	23.571.333,18	25.587.890,37	24.656.879,78	25.617.951,26	29.213.899,42
b. ADHK (Juta Rp)	16.256.962,68	17.322.035,97	16.496.334,06	16.544.177,99	18.422.598,05
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	34,82	35,17	34,17	33,44	34,45
Pertumbuhan PMTB	6,77	6,55	-4,77	0,29	11,35
<i>*Angka Sementara/Preliminary Figures</i>					
<i>**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures</i>					

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2018-2022 pertumbuhan PMTB berfluktuasi, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai besaran angka 11,35 persen. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan PMTB mengalami penurunan drastis. Hal ini disebabkan adanya kejadian pandemi Covid-19 yang mengakibatkan masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran terhadap PMTB, baik bangunan maupun non-bangunan, dan mengalihkan pengeluarannya ke hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan kesehatan dan pencegahan dari pandemi Covid-19.

3.5. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kota Malang, Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
1	2	3	4	5	6
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Juta Rp)	758.687,56	794.567,69	280.294,39	593.289,10	645.843,84
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	410.126,43	416.098,18	144.800,33	297.747,03	303.337,81
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,12	1,09	0,39	0,77	0,76
*Angka Sementara/Preliminary Figures					
**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures					

Perubahan inventori dapat dianalisis dari sisi proporsi. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tahun 2018 nilai inventori mencapai 758.687 juta rupiah. Pada tahun 2019 terus mengalami kenaikan dengan nilai inventornya sebesar 794.567 juta rupiah. Sementara pada tahun 2020 perubahan inventori menunjukkan angka yang menurun pesat yaitu tinggal sebesar 280,294 juta rupiah. Fenomena ini juga diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang terjadi

selama tahun 2020. Pada tahun berikutnya dimana keadaan Covid-19 sudah dapat diatasi nilai inventori meningkat menjadi 593.289 juta rupiah (2021) dan 645.843 juta rupiah (2022). Pada tahun 2018, proporsi perubahan inventori adalah 1,12 persen; 1,09 persen (2019); 0,39 persen (2020); 0,77 persen (2021), dan 0,76 persen (2022).

3.6. PERKEMBANGAN NET EKSPOR BARANG DAN JASA

Ekspor dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam beberapa cara. Pertama, pengaruh langsung ekspor yaitu dengan adanya perbaikan teknologi bagi masing-masing negara yang melakukan kegiatan perdagangan luar negeri. Kedua, ekspor dapat membantu mengatasi kendala nilai tukar mata uang (exchange rate). Hal ini kemudian menjadi pendorong bagi sebuah negara untuk melakukan impor, termasuk impor barang modal. Ketiga, berdasarkan penelitian Levine dan Renelt (1992) dalam Alam (2003) diperoleh bukti bahwa perbandingan antara ekspor dengan PDRB memiliki hubungan yang sangat kuat dengan perbandingan antara investasi dengan PDRB. Terdapat hubungan tidak langsung antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi (PDB) melalui investasi. Pertumbuhan ekonomi berasal dari nilai laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB).

Transaksi ekspor dalam struktur permintaan akhir menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Malang, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya

terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kota Malang. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Malang di luar kota dalam satu provinsi, provinsi lainnya, ataupun luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 11. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa

Uraian		2018	2019	2020	2021*)	2022**)
1		2	3	4	5	6
Total Nilai Ekspor						
a.	ADHB (<i>Juta Rp</i>)	-6.833.689,96	-8.129.843,56	-5.121.303,72	-4.347.785,53	-4.244.850,03
b.	ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	-2.840.702,46	-2.881.369,55	-1.492.106,47	-470.696,07	-1.053.047,65
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)		-10,09	-11,17	-7,10	-5,67	-5,01
*Angka Sementara/Preliminary Figures						
**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures						

Dari sisi ADHB, nilai net ekspor barang dan jasa tahun 2018–2022 secara umum menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun 2019. Pada tahun 2018 nilai net ekspor barang dan jasa sebesar (6,833,689.96) juta rupiah. Tahun 2019 net ekspor mengalami penurunan menjadi (8.129.843,56) juta rupiah, namun tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi (5.121.303,72) juta rupiah. Kemudian pada tahun 2021 nilai net ekspor kembali meningkat menjadi

(4.347.785,53) juta rupiah dan pada tahun 2022 terus meningkat hingga (4.244.850,03) juta rupiah. Sejalan dengan nilai net ekspor ADHB, nilai net ekspor ADHK 2010 juga menunjukkan arah yang sama, yaitu cenderung meningkat. Nilai minus yang ditunjukkan baik pada ADHB maupun ADHK mengindikasikan bahwa aktivitas impor barang dan jasa Kota Malang lebih besar jika dibandingkan dengan aktivitas ekspor barang dan jasa.

Jika dilihat dari proporsinya selama kurun waktu 2018–2022, net ekspor barang dan jasa memiliki peranan yang relatif meningkat terhadap PDRB Kota Malang. Pada tahun 2018 andil net ekspor barang dan jasa adalah sebesar (10,09) persen; (11,17) persen (2019); (7,10) persen (2020); (5,67) persen (2021); dan (5,01) persen (2022).

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
PENGELUARAN KOTA MALANG 2018 - 2022

<https://malangkota.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB perkapita.

Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita

Kota Malang, Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
1	2	3	4	5	6
Nilai PDRB (Juta Rp)					
a. ADHB (Juta Rp)	67.696.347,84	72.764.205,45	72.163.188,51	76.617.344,92	84.807.432,08
b. ADHK (Juta Rp)	49.500.825,23	52.334.750,27	51.154.530,52	53.309.702,35	56.678.636,48
PDRB per-Kapita (Ribuan Rp)					
a. ADHB (Ribuan Rp)	78.16,65	83.57,51	85.520,66	90.678,60	100.230,26
b. ADHK (Ribuan Rp)	57.152,52	60.107,77	60.623,28	63.093,41	66.986,05
Pertumbuhan					
PDRB per-Kapita ADHK 2010	5,14	5,17	0,86	4,07	6,17
Jumlah penduduk (Jiwa)	866.118	870.682	843.810	844.933	846.126
Pertumbuhan	0,55	0,53	-3,09	0,13	0,14
*Angka Sementara/Preliminary Figures					

****Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures**

Tabel 16 menunjukkan peningkatan PDRB per-kapita Kota Malang dari tahun ke tahun yang seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Secara ekonomi setiap penduduk Kota Malang rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita pada masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu, pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 4-6 persen, kecuali pada tahun 2020 dimana menurun sebesar 0,86 persen. Kemudian pada tahun berikutnya meningkat 4,07 persen (2021) dan 6,17 persen (2022). Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas

4.2. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah Kota Malang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 13. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB

Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
1	2	3	4	5	6
Total Konsumsi Rumah Tangga (ADHB) (Juta Rp)	47,523,595.13	51,657,042.11	49,668,544.71	51,925,952.81	56,408,423.93
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	23,571,333.18	25,587,890.37	24,656,879.78	25,617,951.26	29,213,899.42
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	2.02	2.02	2.01	2.03	1.93
<i>*Angka Sementara/Preliminary Figures</i>					
<i>**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures</i>					

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB pada tahun 2018-2022 mengalami tren penurunan. Pada tahun 2018 rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB sebesar 3,55 bernilai konstan pada tahun 2019. Sementara tahun-tahun berikutnya rasionya menjadi 3,53 (2020), 3,55 (2021) dan 1,93 pada tahun 2022. Hal ini terjadi karena nilai investasi cenderung melambat, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan.

4.3. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda beda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 14. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kota Malang, Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
1	2	3	4	5	6
Konsumsi Akhir (ADHB) (Juta Rp)					
a. Rumah tangga	47.523.595,13	51.657.042,11	49.668.544,71	51.925.952,81	56.408.423,93
b. LNPRT	326.644,23	364.660,93	371.897,54	422.101,87	434.130,93
c. Pemerintah	2.349.777,70	2.489.887,90	2.306.875,82	2.405.835,41	2.349.983,98
Jumlah	50.200.017,06	54.511.590,94	52.347.318,06	54.753.890,08	59.192.538,85
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	67.696.347,84	72.764.205,45	72.163.188,51	76.617.344,92	84.807.432,08
Proporsi	74,15	74,92	72,54	71,46	69,80
*Angka Sementara/Preliminary Figures					
**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures					

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 80 persen). Meskipun

konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin menurun.

<https://malangkota.bps.go.id>

BAB V

PENUTUP

<https://malangkota.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2018 s.d 2022 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Malang pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2018 sampai dengan 2022, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan

disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar wilayah secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Malang terhadap ekonomi daerah lain (*rest of the world*).

<https://malangkota.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://malangkota.bps.go.id>

Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Malang

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	47.523.595,13	51.657.042,11	49.668.544,71	51.925.952,81	56.408.423,93
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	326.644,23	364.660,93	371.897,54	422.101,87	434.130,93
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.349.777,70	2.489.887,90	2.306.875,82	2.405.835,41	2.349.983,98
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	23.571.333,18	25.587.890,37	24.656.879,78	25.617.951,26	29.213.899,42
5. Perubahan Inventori	758.687,56	794.567,69	280.294,39	593.289,10	645.843,84
6. Net Ekspor	-6.833.689,96	-8.129.843,56	-5.121.303,72	-4.347.785,53	-4.244.850,03
PDRB	67.696.347,84	72.764.205,45	72.163.188,51	76.617.344,92	84.807.432,08
<i>* Angka Sementara/Preliminary Figures</i>					
<i>** Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures</i>					

Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	34.066.650,51	35.807.395,54	34.383.879,24	35.284.130,85	37.324.951,50
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	198.406,59	217.296,88	218.044,58	246.448,21	249.281,48
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.409.381,49	1.453.293,26	1.403.578,78	1.407.894,35	1.431.515,30
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	16.256.962,68	17.322.035,97	16.496.334,06	16.544.177,99	18.422.598,05
5. Perubahan Inventori	410.126,43	416.098,18	144.800,33	297.747,03	303.337,81
6. Net Ekspor	-2.840.702,46	-2.881.369,55	-1.492.106,47	-470.696,07	-1.053.047,65
PDRB	49.500.825,23	52.334.750,27	51.154.530,52	53.309.702,35	56.678.636,48
<i>*Angka Sementara/Preliminary Figures</i>					
<i>**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures</i>					

Tabel 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	70,20	70,99	68,83	67,77	66,51
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,48	0,50	0,52	0,55	0,51
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,47	3,42	3,20	3,14	2,77
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	34,82	35,17	34,17	33,44	34,45
5. Perubahan Inventori	1,12	1,09	0,39	0,77	0,76
6. Net Ekspor	-10,09	-11,17	-7,10	-5,67	-5,01
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>*Angka Sementara/Preliminary Figures</i>					
<i>**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures</i>					

Tabel 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Malang

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,12	5,11	-3,98	2,62	5,78
2. Konsumsi LNPRT	7,20	9,52	0,34	13,03	1,15
3. Konsumsi Pemerintah	4,92	3,12	-3,42	0,31	1,68
4. PMTB	6,77	6,55	-4,77	0,29	11,35
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	5,72	5,73	-2,26	4,21	6,32
<i>*Angka Sementara/Preliminary Figures</i>					
<i>**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures</i>					

Tabel 5 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kota Malang

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	139,50	144,26	144,45	147,17	151,13
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	164,63	167,82	170,56	171,27	174,15
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	166,72	171,33	164,36	170,88	164,16
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	144,99	147,72	149,47	154,85	158,58
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	136,76	139,04	141,07	143,72	149,63
<i>*Angka Sementara/Preliminary Figures</i>					
<i>**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures</i>					

Tabel 6 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kota Malang

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,50	3,41	0,13	1,88	2,69
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,81	1,93	1,63	0,42	1,68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,09	2,76	-4,07	3,97	-3,93
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,27	1,88	1,18	3,60	2,41
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	3,14	1,67	1,46	1,88	4,11
<i>*Angka Sementara/Preliminary Figures</i>					
<i>**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures</i>					

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri*, 1980-1990, Jakarta.
3. _____, *Jawa Timur Dalam Angka*, berbagai seri, Surabaya.
4. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Proyeksi Penduduk 2010-2035*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Kesejahteraan Rakyat*, berbagai seri, Surabaya.
8. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
11. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
12. *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
13. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD*, 1997, Jakarta 2000.
14. _____, *Profil Ekonomi Rumahtangga* 1998, Jakarta 1999.
15. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
16. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, WashingtonDC, 1979.
17. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
18. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
19. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
20. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
21. _____, *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
22. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
23. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
24. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
25. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://malangkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MALANG**

Jalan Raya Janti Barat No.47
Bandungrejosari, Kota Malang
Telp. (0341) 801164 | Fax. (0341) 805871
malangkota.bps.go.id | bps3573@bps.go.id